

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data mengenai Pengaruh *Gender Diversity*, *Firm Size* dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Tax Avoidance* dengan *Political Connection* sebagai variabel moderasi (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Infrastruktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Gender Diversity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Semakin tinggi proporsi perempuan dalam struktur dewan direksi, maka kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak cenderung menurun. Keberadaan perempuan dalam posisi strategis diyakini membawa nilai-nilai kepatuhan, kehati-hatian, dan sensitivitas etika yang lebih tinggi, sehingga berpengaruh dalam membatasi kebijakan-kebijakan agresif yang berisiko terhadap kepatuhan pajak.

2. *Firm Size* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Perusahaan berskala besar cenderung memiliki sistem pelaporan dan pengawasan yang lebih kompleks serta berada di bawah pengawasan publik dan otoritas yang lebih ketat. Hal ini mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan, karena eksposur terhadap risiko hukum maupun reputasi juga semakin tinggi. Dengan demikian, semakin besar ukuran perusahaan, semakin kecil kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak.

3. *Tunneling Incentive* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki insentif tinggi untuk mengalihkan kekayaan kepada pihak terafiliasi tidak serta merta menunjukkan kecenderungan tinggi dalam menghindari pajak. Salah satu kemungkinan penjelasannya adalah bahwa pelaku *tunneling* sudah mendapatkan manfaat ekonomi melalui cara lain, sehingga tidak terdorong untuk menambah risiko melalui penghindaran pajak. Atau, perusahaan yang memiliki potensi *tunneling* tinggi justru berupaya menjaga kepatuhan formal agar tidak memicu perhatian lebih dari otoritas pengawas.

4. *Political Connection* tidak memoderasi pengaruh antara *Gender Diversity* dengan *Tax Avoidance*.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa koneksi politik tidak memiliki peran signifikan dalam memperkuat atau melemahkan pengaruh keberagaman gender terhadap kecenderungan penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai transparansi dan kepatuhan yang dibawa oleh keberadaan perempuan dalam dewan direksi belum tentu terpengaruh oleh koneksi politik perusahaan.

5. *Political Connection* tidak memoderasi pengaruh antara *Firm Size* dengan *Tax Avoidance*

Koneksi politik juga tidak terbukti memengaruhi hubungan antara ukuran perusahaan dan kecenderungan penghindaran pajak. Bisa jadi hal ini disebabkan oleh perusahaan besar yang sudah memiliki struktur

pengawasan yang cukup mapan, sehingga pengaruh eksternal seperti hubungan politik tidak berperan banyak dalam memengaruhi kebijakan perpajakan mereka.

6. *Political Connection* memoderasi secara signifikan hubungan antara *Tunneling Incentive* dan *Tax Avoidance*.

Pada perusahaan yang memiliki insentif tinggi untuk melakukan tunneling, keberadaan koneksi politik terbukti memperkuat pengaruh tersebut terhadap penghindaran pajak. Artinya, perusahaan yang memiliki hubungan dekat dengan kekuasaan lebih berani mengambil langkah strategis untuk memanfaatkan celah-celah penghindaran pajak, terutama jika sudah ada kecenderungan untuk mengalihkan kekayaan ke entitas lain yang terafiliasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kontrol internal bisa menjadi lemah jika tidak diimbangi dengan pengawasan eksternal yang netral dan bebas dari intervensi politik.

## **B. Implikasi dan Saran**

### **1. Implikasi**

Secara konseptual, temuan ini mendukung pemikiran bahwa faktor-faktor seperti keberagaman gender, skala perusahaan, serta kecenderungan *tunneling* memiliki peran yang berbeda dalam memengaruhi perilaku pajak perusahaan. Keberadaan perempuan dalam struktur pengambilan keputusan, misalnya, dapat menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan sistem tata kelola yang lebih akuntabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberagaman gender dalam dewan direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik *tax avoidance*. Artinya, semakin beragam komposisi gender dalam dewan direksi, khususnya dengan meningkatnya proporsi perempuan, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Implikasi bagi perusahaan adalah perlunya mempertimbangkan keberagaman gender dalam proses rekrutmen dan penempatan posisi strategis di manajemen puncak. Bagi pemerintah dan regulator pasar modal, temuan ini menjadi dasar untuk mendorong kebijakan *gender diversity disclosure* dan insentif bagi perusahaan yang memiliki proporsi dewan direksi perempuan yang memadai.

Sementara itu, perusahaan berskala besar cenderung memiliki dorongan yang lebih kuat untuk menjaga reputasi dan kepatuhan pajak. Ukuran perusahaan terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki total aset dan kapasitas usaha yang lebih besar cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Implikasi bagi manajemen perusahaan adalah bahwa skala usaha yang lebih besar harus diimbangi dengan penerapan tata kelola perusahaan yang kuat, sistem pelaporan keuangan yang transparan, dan strategi kepatuhan pajak yang jelas. Bagi otoritas pajak, temuan ini dapat digunakan untuk menyesuaikan strategi pengawasan, dengan memberikan perhatian khusus pada perusahaan kecil-menengah yang secara statistik memiliki potensi penghindaran pajak lebih tinggi.

Hasil menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Artinya, semakin kecil potensi *tunneling* (pemindahan sumber daya atau aset dari perusahaan kepada pihak berelasi untuk keuntungan pribadi), semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Implikasi bagi pemegang saham adalah pentingnya memantau transaksi dengan pihak berelasi dan memastikan adanya mekanisme pengendalian internal yang memadai. Bagi regulator, temuan ini memperkuat urgensi transparansi laporan keuangan dan pengungkapan transaksi pihak berelasi.

Political Connection terbukti memoderasi secara signifikan pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*, namun tidak memoderasi pengaruh *gender diversity* dan *firm size*. Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan politik dapat memperlemah atau memperkuat efek *tunneling incentive* terhadap praktik penghindaran pajak. Implikasi bagi pemerintah adalah perlunya regulasi yang membatasi potensi konflik kepentingan antara pejabat publik dan pelaku usaha, serta memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki koneksi politik. Bagi investor, temuan ini menjadi sinyal untuk lebih berhati-hati dalam menilai risiko kepatuhan pajak pada perusahaan yang memiliki koneksi politik.

Namun, implikasi yang paling penting muncul dari temuan bahwa koneksi politik hanya berperan signifikan dalam memperkuat pengaruh negatif dari *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*. Hal ini

mengindikasikan bahwa pengaruh politik dalam dunia usaha tidak selalu bersifat netral, dan bahkan dapat membuka ruang bagi perilaku oportunistik jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan regulasi yang ketat. Oleh karena itu, hubungan antara pemilik perusahaan dan aktor politik perlu menjadi perhatian khusus dalam kebijakan fiskal maupun tata kelola korporat.

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi yang penting dalam memahami dinamika praktik penghindaran pajak di Indonesia, khususnya dalam konteks karakteristik internal perusahaan dan pengaruh koneksi politik.

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka peneliti menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan dan cakupan penelitian ini. Untuk itu, diharapkan penelitian mendatang dapat memperbaiki dan mengembangkan aspek-aspek yang belum tergarap secara maksimal, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih mendalam dan komprehensif. Adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang berpotensi memengaruhi *tax avoidance*, seperti efektivitas komite audit, kepemilikan manajerial, kualitas audit, atau karakter eksekutif.
2. Penggunaan sampel yang lebih luas baik dari sisi sektor industri maupun rentang waktu penelitian dapat memberikan gambaran yang

lebih menyeluruh mengenai pola penghindaran pajak di berbagai konteks perusahaan.

3. Selain menggunakan regresi linier berganda, peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan pendekatan lain seperti regresi panel data, analisis jalur (*path analysis*), atau *structural equation modeling (SEM)* untuk menguji hubungan kausal yang lebih kompleks.
4. Mengingat adanya pengaruh *political connection* yang signifikan terhadap hubungan variabel tertentu, peneliti mendatang dapat mengeksplorasi lebih dalam peran lingkungan institusional, regulasi pajak yang berlaku, atau stabilitas politik dalam memengaruhi perilaku pajak perusahaan.